

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

##### **1. Bidang Kesehatan**

###### **a. Dasar Hukum**

- 1) Permenkes Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014.
- 2) Permenkes Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penggunaan Dana (DAK) Tahun Anggaran 2017.

###### **b. Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Tugas Pemberian Dana APBN Tahun Anggaran 2017 berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

###### **c. Program Dan Kegiatan**

- 1) DAK Fisik Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Program Kegiatan yaitu :
  - a) DAK Pelayanan Dasar
  - b) DAK Pelayanan Farmasi
- 2) DAK Non Fisik mendanai kegiatan Non fisik bidang kesehatan terdiri atas :
  - a) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
  - b) Jaminan Persalinan (Jampersal)
  - c) Akreditasi Puskesmas

###### **d. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

- 1) DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar 95%
- 2) DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi 91%
- 3) DAK Non Fisik 2016 BOK 34%
- 4) DAK Non Fisik 2016 Jampersal 2%

- 5) DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas 40%
- e. Sumber Dana Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 Bersumber Dari Kementerian Kesehatan RI Berupa Kegiatan Fisik Dan Non Fisik Terdiri :

  - 1) DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar Rp.14.576.012.050,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Belas Ribu Lima Puluh Rupiah)
  - 2) DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi Rp.5.611.664.427,- (Lima Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
  - 3) DAK Non Fisik 2016 BOK Rp.1.261.536.250,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
  - 4) DAK Non Fisik 2016 Jampersal Rp.17.581.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
  - 5) DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas Rp.105.759.103,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Rupiah)
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu DAK Fisik pada bidang Pelayanan Farmasi dan Pebealan Kesehatan (YANFAR PERBEKKES) dan DAK Non Fisik pada Bidang Pelayanan Medik (YANMED).
- g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidik, Pangkat dan Golongan Terlampir Pada Lampiran III.F.1
- h. Permasalahan dan Solusi
  - 1) DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar

Permasalahan : Pengadaan Alkes dengan proses E-Katalog dan tender, dananya mengalami keterlambatan sehingga memperngaruhi proses pencairan Alkes. Pencairan pada akhir tahun tanggal 30 Desember 2016, batas proses pencairan ahir tahun tutup buku pada kas daerah tanggal 29 Desember 2016 Sehingga kegiatan tersebut beralih ke tahun 2017 sebagai DAK Tambahan/Lanjutan.

Solusi : Proses Pencairan kegiatan dipercepat sebelum akhir tahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan mencapai 100%

2) DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi

Permasalahan : Tidak tersedianya obat yang dibutuhkan pada penyedia E-Catalog, sehingga mengalami kekurangan obat yang dibutuhkan dan masalah jaringan aplikasi pada LPSE.

Solusinya : Pemesanan obat sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun.

3) DAK Non Fisik 2016 BOK

Koordinasi kurang berjalan antara PPTK, Bendahara dengan PPKAD tentang proses pencairan dana BOK sehingga sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan Dana BOK

LPJ dari FKTP ke dinkes tidak tepat waktu sesuai dengan kesepakatan sesuai tanggal 5 bulan berjalan sehingga pencairan dana BOK terlambat.

4) DAK Non Fisik 2016 Jampersal

a) Jukni Jampersal yang belum baku

b) Ibu hamil yang mendapatkan di RTK adalah ibu hamil yang berdomisili sulit, sedangkan kita ketahui secara geografis hanya beberapa FKTP yang masuk kategori tersebut (Akses Sulit) atau FKTP yang mempunyai wilayah kepulauan

5) DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas

Transfer dana Akreditasi Puskesmas dari pusat ke kabupaten Penerima melalui PPKAD dalam bentuk dana DAK Non Fisik yang tergabung di dalamnya BOK, Jampersal dan Akreditasi Puskesmas. Sementara kegiatan akreditasi akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga pada saat yang sama semua Program kegiatan DAK Non Fisik ikut terpengaruh.

## **2. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura**

### **a. Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan kepada Gubernur

dalam Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia.

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

100 % (seratus persen).

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Jumlah Anggaran : Rp. 1.139.925.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Terlampir pada lampiran III.F.1

h. Permasalahan dan Solusi

Dampak kekeringan pada beberapa lokasi pertanaman yang disebabkan El Nino.

### **3. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air**

a. Dasar Hukum

DIPA No : 018.04.199133/2015 Tanggal 14 November 2014.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor 829/153/DISTPH tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, tanggal 23 Januari 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Pengembangan Optimal Lahan mendukung Tanaman Pangan (Realisasi 100%).

2) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

- Pengembangan alat dan mesin pertanian (realisasi 92,71%)
- Fasilitasi sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian (realisasi 100%).

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- Layanan perkantoran (realisasi 70,58%)
- Pendampingan kegiatan terkait program TNI AD mendukung ketahanan pangan (TMKP) (realisasi 83,35%).

4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Pendampingan penyaluran pupuk (realisasi 93,94%).

d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber Dana : APBN, jumlah anggaran Rp. 4.386.100.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Terlampir pada lampiran III.F.1

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian membutuhkan sarana pengangkutan gabah (kendaraan bermotor roda tiga) dan gudang produksi.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Aspek teknis

- a) Perluasan Areal dan pengelolaan lahan pertanian, permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan optimasi lahan

adalah kekeringan karena kurangnya curah hujan setelah penanaman akibat kemarau yang lebih awal dan berkepanjangan.

- b) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana pendukung berupa gudang produksi sebagai tempat penyimpanan gabah kering giling (GKG) dan diperlukan lantai jemur.

2) Aspek administrasi

Kendala yang dihadapi yaitu jadwal yang tidak sesuai dengan rencana. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi dengan bendahara satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

#### **4. Bidang Kehutanan**

a. Dasar Hukum

Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Satker Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae Nomor SP DIPA.029.04.2.427061/2015 Tanggal 14 November 2015 (Revisi ke-2, tanggal 09 April 2015).

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

2) Kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh dua persen).

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber DIPA Nomor SP DIPA – 029.04.2.427061/2015 Tanggal 4 November 2014, jumlah anggaran Rp.295.254.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Terlampir pada lampiran III.F.1

## **5. Bidang Kependudukan**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 4) Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-010.08.4.191440/2016.

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.

### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Rp.981.313.500,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan**

Sumber Dana : APBN TA. 2016 (Rupiah Murni) Rp.686.048.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

### **f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Terlampir pada lampiran III.F.1

### **h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan kurang mencukupi untuk mendukung kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan secara optimal, antara lain berupa kondisi gedung kantor yang kurang memadai, tidak ada kendaraan operasional untuk pelayanan keliling dan sarana pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi data (VSAT mobile), komputer PC dan Laptop.

i. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah personil PNS yang memiliki kemampuan teknis untuk pengoperasian Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
- b) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
- c) Masih kurangnya sinergi antara desa/kelurahan, kecamatan, dan SKPD terkait lainnya dengan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penduduk atas hak untuk memperoleh identitas dan hak-hak sipil lainnya;
- d) Dibutuhkan diplomasi yang lebih intens untuk mendapatkan anggaran melalui Dana Tugas Pembantuan dan APBN untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi wilayah geografis Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Solusi

- a) Penambahan jumlah personil PNS dan pendidikan dan latihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai terkhusus *updating* data untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b) Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD



terkait dengan difasilitasi oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

- d) Penyusunan rencana anggaran Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN agar dilakukan secara bottom up dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil;
- e) Rehabilitasi/pembangunan gedung kantor yang didesain sebagai sebuah fasilitas pelayanan publik yang baik dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

## **6. Bidang Ketahanan Pangan**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2014 Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018-11.3.199374/2013 Tanggal 05 Desember 2013;
- 2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 910/45/A2/SK//BKPD, Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Anggaran dan Besarnya Honor Terkait Dengan Operasional Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian (Tingkat Kabupaten/Kota) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014, Tanggal 21 Januari 2014.

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,**

- 1) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
- 2) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

- d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Rp.252.620.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.252.620.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar:  
Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)  
Jumlah Dana : Rp.216.620.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan  
Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)  
Jumlah Dana : Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan :  
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Terlampir pada lampiran III.F.1
- g. Permasalahan dan Solusi  
Tidak ada permasalahan/kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan terlihat dari realisasi fisik dan keuangan kegiatan mencapai 100% pada Tahun Anggaran 2016.
- h. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- 1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar :
- a) Jumlah desa yang diberdayakan melalui pendampingan pengembangan kawasan rumah pangan lestari pada tahun 2015 sebanyak 6 desa dan tahun 2016 adalah tahap pengembangan sebanyak 6 desa atau terealisasi 100%. Perkembangan jumlah desa yang diberdayakan melalui kegiatan dana dekonsentrasi sejak tahun 2012 sampai 2016 nampak pada table berikut :

**Tabel 5.a**  
**Perkembangan Jumlah Kelompok P2KP Melalui**  
**Optimalisasi Lahan Pekarangan**  
**di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 -2016**

NO	KEC. DESA KELURAHAN	OPTIMALISASI LAHAN PEKARANGAN/KRPL		P2KP PADA KEBUN SEKOLAH	PENYULUH PENDAMPING	KET
		NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGG.	NAMA SEKOLAH		
1	<b>BONTOMATENE</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Barat Lambongan	Teratai	28		Muh. Sadli, A.Md	
	Maharayya	Anggrek IV	20		Hamzah Raja, SP	
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Tamalarea	Anggrek	30	SDN Barangka	Rezki Wiradah	
	Onto	Joro Bodo Mandiri	30	SMPN 2 Bontomatene	Suwardi Lakoro	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Tanete	Langsogaiya	30	SD Parangia	Dehang, S.ST	
	Tahun 2015-2016	Makmur	15		Sawarti	
2	<b>BUKI</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Buki	Melati I	17		Cayana, S.ST	
	Kohala	Mekar	20		Andi Usral	
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Lalang Bata	Sejahtera	30	MTSN 2 Bontomatene	Datulangi, S.ST	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Bontolempangan	Mawar	30	SDN Tanabau	Abd. Hakim	
3	<b>BONTOMANAI</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Polebungin	Anggrek I	18		Nur. Abidin	
	Parak	Matahari	20		A. Husni Tabe, S.ST	
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Bonea Timur	Mawar	30	MTS Lembang Bau	Nur Aeda	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Bontomarannu	Flamboyan	30	SD Bontomarannu	Mei sudarjo, SP.,MP	
	Jambuiya	Makmur	30	SD LB. Matene	Suriani, A.Md	
	<b>Tahun 2015-2016</b>					
	- Mare-mare	Mawar	15		Nasrianti, SP.	
	- Bonea Timur	Melati	15		Nur Aeda	

NO	KEC. DESA KELURAHAN	OPTIMALISASI LAHAN PEKARANGAN/KRPL		P2KP PADA KEBUN SEKOLAH	PENYULUH PENDAMPING	KET
		NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGG.	NAMA SEKOLAH		
4	<b>BENTENG</b>					
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Benteng Utara	Kembang Melati	30	SMKN 1 Benteng	Umi Azimar, SP	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Benteng Selatan	Lorong Bambu	30	SMK	Abd. Haliq, SP	
5	<b>BONTOHARU</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Kalepadang	Kartini	21		Herlina	
	Bontotangga	Kamboja	20		Rahmi Apriati, SP	
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Putabangun	Seruni	30	SDN Tabang	St. Nurlaela, DS	
6	<b>BONTOSIKUYU</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Harapan	Matahari	23		Hasmiati, A.Md	
	Laiyolo	Mawar	20		Normawati	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Patilereng	Tunas Harapan	30	SD Reaiya	Nur Syamsi, A.Md	
	<b>Tahun 2015-2016</b>					
	- Laiyolo	Matahari	15		Normawati	
	- Bin. Sombayya	Binanga Jaya	15		Andi Nurlia	
	- Laiyolo Baru	Melati	15		Mardati A. SP.	
7	<b>PASIMASUNGGU</b>					
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Masungke	Kuncup Mekar	30	SD Inpres Dodak	Syahrul	
8	<b>TAKA BONERATE</b>					
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Kayuadi	Mentari	30	SD Inpres Kayuadi	Andi Mutiara	

b) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2012, terdiri dari kelompok optimalisasi lahan pekarangan dan kelompok pengolahan tepung-tepungan masing-masing 10 kelompok, mendapat bansos dengan pemanfaatannya untuk :

- Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

- Pengembangan pengolahan tepung-tepungan sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2013, mendapat bansos Rp.47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan pemanfaatannya untuk :
- Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - Pengembangan Kebun Bibit sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
  - Pengembangan Kebun Sekolah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pengembangan Menu B2SA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- d) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2013 (lanjutan), mendapat bansos Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan pemanfaatannya untuk Kebun Bibit.
- e) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2014, mendapat bansos Rp.47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan pemanfaatannya untuk :
- Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - Pengembangan Kebun Bibit sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
  - Pengembangan Kebun Sekolah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Alat Pendukung Pengembangan Menu B2SA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- f) Kelompok Penerima Manfaat Tahun 2014 (lanjutan), Mendapat Bansos Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk penyediaan bibit masyarakat.
- g) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2015 mendapat bansos Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan pemanfaatannya untuk :

- Pembuatan kebun bibit sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
  - Pekarangan Anggota sebesar Rp. 8.000.0000,- (Delapan Juta Rupiah)
  - Pembuatan Demplot sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
  - Pelatihan Pendampingan P2KP sebesar Rp.9.120.000,- (Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- i) Kelompok Penerima Manfaat tahun 2016, untuk mendapat bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per kelompok dengan pemanfaatannya untuk :
- Pembuatan kebun bibit sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
  - Pekarangan Anggota sebesar Rp.6.000.0000,- (Enam Juta Rupiah)
  - Pembuatan Demplot sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
  - Pelatihan Pendamping P2KP sebesar Rp.11.460.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Enm Puluh Ribu Rupiah)
- j) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Rp.155.660.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) berasal dari Dana Dekonsentrasi (APBN) sebanyak Rp.127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

2) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan :

- a) Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan (1 Dokumen) terealisasi 100%.
- b) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran
- Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)
  - Jumlah Dana : Rp.28.500.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c) Pelaksanaan Program: Januari – Desember 2016
- Total Dana Dekonsentrasi : Rp.155.660.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - Terealisasi: Rp.155.660.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (100%)
- d) Permasalahan dan Solusi :

Tidak ada permasalahan/kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan terlihat dari realisasi fisik dan keuangan kegiatan mencapai 100% pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini berhasil tercapai karena :

- Semakin intensifnya penyuluh melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dalam pemenuhan gizi keluarga yang bersifat B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
- Pola komunikasi yang jujur dan transparan terhadap maksud serta tujuan dari program-program P2KP
- Dukungan besar dari setiap pihak/stakeholder yang terlibat di dalamnya.

## **7. Bidang Kelembagaan Petani/Penyuluh dan Penyelenggaraan Penyuluhan**

### **a. Dasar Hukum :**

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-018.10.199375/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Satuan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan (1999375),
- 2) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016,
- 3) SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 910/3196/SK/II/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf Pengelola Keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian pada Satuan Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 Tanggal 15 Februari 2016,
- 4) SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 910/058/SK/II/2016 tentang Penunjukan Operator Simluh dan Administratur Cyber Extension di Kabupaten Kepulauan Selayar pada satuan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan (1999375) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 24 Februari 2016.

### **b. Instansi Pemberi Kegiatan dana Dekonsentrasi yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan.**

c. SKPD yang Melaksanakan Kegiatan Dana Dekonsentrasi yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar.

d. Program Kegiatan dan Pelaksanaannya :

1) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

- Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- Kelembagaan Penyuluh Pertanian yang di Fasilitas:1 unit
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten
- Temu teknis tingkat kabupaten/Kota.
- Pengembangan data base penyuluhan tingkat kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
- Administrasi Kegiatan
- Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

2) Materi Penyuluhan Tk Provinsi

- Pengembangan Materi Penyuluhan melalui langganan tabloid pertanian.
- Langganan majalah materi pertanian bagi kelembagaan provinsi.

e. Pelaksanaannya : Januari - Desember 2016

f. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)

Jumlah Dana : Rp.375.753.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Terealisasi : Rp.375.753.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) (100%)

g. Permasalahan dan Solusi :

Selama pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung tidak ditemukan permasalahan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari Realisasi Fisik dan Keuangan yang mencapai 100%.

## **8. Bidang Kelautan Dan Perikanan, Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

a. Dasar Hukum

1) DIPA Nomor : DIPA-032.07.4.199503/2015 tanggal 07 Juli 2015



- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.86/MEN/KU.611/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, tanggal 15 April 2015.
- b. Instansi Pemberi Tugas Pemberian  
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Kegiatan
  - 1) Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis;
  - 2) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha.
- d. Sumber Dana APBN TP
  - 1) PHLN, Jumlah anggaran : Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
  - 2) Rupiah murni, jumlah anggaran Rp.1.022.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Rupiah).